NEGARA HUKUM INDONESIA

Nama Mahasiswa: Cyntia Onggara Renylius

Email: jonyong327@gmail.com

No.BP: 2010003600055

Universitas Ekasakti Padang

A. PENDAHULUAN

Setiap negara hukum yang menganut tipe Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental selalu memiliki “ kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka” sebagai sarana perlindungan hukum bagi warganya. Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945) yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal itu menunjukkan pengakuan yang tegas dan kuat dalam sistem hukum indonesia, sehingga pembentukan konstitusi memandang perlu merumuskannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945).

Negara Hukum Indonesia yang dikenal menganut tipe rechtsstaat, setelah amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 istilah rechtsstaat dinetralkan menjadi “ negara hukum” tanpa lebel rechtsstaat yang diletakan dalam kurung. Dengan demikian, politik Hukum di Indonesia tentang konsepsi negara hukum menggabungkan dua unsur yang baik dari rechtsstaat dan the rule of law, bahkan sistem hukum lain sekaligus. Dengan Konstruksi Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia 1945 sekarang terjadi pergeseran pengaturan negara hukum, di mana sebelum amandemen UUD 1945 dengan kalimat ”Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). Setelah amandemen, rumusan

tersebut dicantumkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yakni pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

B. PEMBAHASAN

Menurut Mahfud penetralan kalimat dalam Pasal 1 ayat (3) tersebut bukan tidak penting artinya, karena di dalamnya terkandung konsep primastik tentang negara hukum, yaitu penggabungan unsur-unsur yang baik pada beberapa konsep yang berbeda-beda dalam suatu konsep yang menyatu (integratif) yang implemantasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Pada tipe negara hukum Eropa Kontinental mengutamakan kepastian hukum, karena sumber utama hukumnya adalah Undang-Undang (tertulis). Jadi, tipe negara hukum ini menganut paham positivistik legalistik. Adapun negara hukumnya tipe Anglo Saxon mengutamakan keadilan. Negara yang menganut tipe ini sumber utama hukum adalah yurisprudensi yang digali oleh hakim melalui hukum yang hidup dalam masyarakat (levend beginselen atau living law of the people). Dengan demikian, tipe ini menganut paham sociological jurisprudence dengan melihat hukum pada kenyataan-kenyataan hukum yang terdapat dalam masyarakat.

Negara hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dengan ciri khas Pancasila. Namun sebagai bagian dari negara hukum pada umumnya, negara hukum Indonesia juga memiliki unsur-unsur umum suatu negara hukum. Konsep negara hukum pancasila pernah dikupas oleh Philipus M. Hadjon, di mana pengakuan terdapat harkat dan martabat manusia dalam negara hukum Indonesia yang secara melekat pada pancasila. Bertolak dari falsafah pancasila Philipus M. Hadjon merumuskan elemen negara hukum pancasila sebagai berikut:

1. Adanya keserasian antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional antara kekuasaan negara.

3. Prinsip menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pandangan lain tentang unsur negara hukum dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie dengan merumuskan 13 prinsip negara hukum Indonesia (rechtsstaat). Ketiga belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menjaga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum (the rule of law ataupun rechtsstaat) yang sebenarnya. Adapun ketiga belas pilar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Supremasi hukum (supremacy of law).
2. Persamaan di dalam hukum (equality before the law).
3. Asas legalitas (due process of law).
4. Pembagian kekuasaan.
5. Organ-organ eksekutif independen.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak.
7. Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peradilan Tata Negara (constitutional court).
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
10. Bersifat demokratis (demokratistische rechtsstaat).
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat).
12. Transparansi dan kontrol sosial.
13. Berketuhan Yang Maha Esa,

Prinsip negara hukum yang di rumuskan oleh Jimly tersebut sangat kompleks dan sesuai dengan pengaturan dalam suatu negara modern yang cenderung

merumuskan segala sesuatu secara rinci tersebut, akan mudah melakukan evaluasi apakah suatu negara dapat disebut sebagai suatu negara hukum modern atau tidak.

Konsepsi pemikiran negara hukum Indonesia juga mengalami pergeseran, yang tadinya kita lebih bertumpu pada model *rechtsstaat*, lebih memilih menggabungkan kedua prinsip dasar negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law* atau dikenal dengan konsep prismatic tersebut. Penggabungan itu secara eksplisit dinayakan dalam bunyi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakkan hukum dan keadilan”. Norma yang dirumuskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut di atas, kemudian dijelaskan lagi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No 48 Tahun 2009) yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Hal yang sama juga pernah diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya, yakni pada Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.

Baik ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang disebut di atas, mengamanatkan secara jelas tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan hukum di Indonesia adalah bukan saja dalam penegakan hukum, melainkan sekaligus untuk mewujudkan keadilan. Keadilanlah yang merupakan tujuan utama hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Berkenaan dengan tujuan hukum tersebut,

Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali mengemukakan bahwa cita hukum (*idee des recht*), yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tujuan hukum tersebut berhubungan dengan upaya-upaya penagakan hukum dalam kehidupan nyata di masyarakat Indonesia. Hal yang sama dengan pandangan Radbruch dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa dalam menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).
3. Keadilan (*Genechtigheid*).

C. PENUTUP

Negara Hukum Indonesia yang dikenal menganut tipe rechtsstaat, setelah amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 istilah rechtsstaat dinetralkan menjadi “ negara hukum” tanpa lebel rechtsstaat yang diletakan dalam kurung. Dengan demikian, politik Hukum di Indonesia tentang konsepsi negara hukum menggabungkan dua unsur yang baik dari rechtsstaat dan the rule of law, bahkan sistem hukum lain sekaligus. Dengan Konstruksi Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia 1945 sekarang terjadi pergeseran pengaturan negara hukum, di mana sebelum amandemen UUD 1945 dengan kalimat ”Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). Setelah amandemen, rumusan tersebut dicantumkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yakni pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v1i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, *Protection of Children and Women's Rights in Indonesiathrough International Regulation Ratification*, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme*, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020..